

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Amirudin, Zainal Asikin 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta.
- Brotodihardjo, Santoso.R, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Budiono, Herlin, 2014, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M Laica Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, P.J.J. van Buuren, F.A.M Stroink, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Indarti, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta.

- Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.
- Nurmantu, Safitri, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.
- Pramukti, Sigit Angger dan Melyani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Y.Sri, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Salim, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soemitro Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2010, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.
- Suandy, Erly, 2009, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Subekti, R, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sumardjono, S.W. Maria, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- _____, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Triyono, Rachmat, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

B. Tesis

Astuti, Vita Damarsari Mardi “Implementasi Dasar Besaran Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Dibuat Oleh PPAT di Kota Yogyakarta ”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Gusridawati, “ Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembayaran Pajak Atas Transaksi Jual Beli tanah dan Bangunan di Kota Padang, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.

Sawitri, Ni Made Dwimayeni ,“ Pengawasan Pembayaran Pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi Berbasis Profesi dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan di Kabupaten Bandung “, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta , 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau

Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-30/PJ/2014 tentang Pengawasan Atas Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Melalui Jual Beli.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyeteroran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya.

Keputusan Bersama Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak Nomor : SKB-2 Tahun 1998 KEP-179/PJ/1998 tentang Laporan Bulanan Pembuatan Akta Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pemberitahuan Bulanan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

D. Internet

“Daftar Nama Notaris Kabupaten Bantul”, <http://www.kumham-jogja.info/pengumuman/info-notaris/1359-notaris-kabupaten-bantul>, 14 Agustus 2016.

Hartono, “ Bayar Pajak dengan e-Billing Mudah dan Praktis”, <http://www.pajak.go.id/content/article/bayar-pajak-dengan-e-billing-mudah-dan-praktis>, diakses tanggal 08 Juni 2017.